

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman disusun dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Oleh karena itu tahap awal dari isu-isu strategis dimulai dengan melakukan analisis terhadap identifikasi permasalahan yang menguraikan tentang aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal dan permasalahan yang dihadapi SKPD selama ini. Adapun tujuannya agar perencanaan strategis yang disusun dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang besar dalam pemecahan permasalahan pembangunan di kabupaten Sleman

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, identifikasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait
2. Kurang optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran.
3. Masih kurangnya SDM yang mempunyai *skill* dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
4. Data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan belum terkelola dengan baik
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman.

6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai Tupoksi.

Adapun permasalahan pelayanan pada masing-masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

### **3.1.1. Identifikasi permasalahan Bidang Koperasi**

Permasalahan Bidang Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*)
3. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
4. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas
5. Akses modal bagi koperasi masih terbatas
6. Rendahnya daya saing koperasi dalam penguasaan teknologi

### **3.1.2. Identifikasi permasalahan Bidang UKM**

Permasalahan Bidang UKM adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas UKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi
2. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya, terutama dalam memperoleh akses pinjaman/ pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.
3. Iklim dunia usaha kurang kondusif, misalnya dalam hal prosedur perijinan maupun transaksi perijinan
4. Rendahnya daya saing UKM dalam hal keterbatasan inovasi, kecepatan teknologi dengan produk permintaan pasar, kepemilikan sertifikat standardisasi, dan jaminan mutu produk UKM.
5. Jaringan kemitraan UKM dan pengembangan pasar masih terbatas
6. Akses modal bagi UKM masih terbatas

Identifikasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi UKM ditunjukkan oleh tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Aspek Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Standar/Tolok Ukur	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Manajerial	Manajerial pengelolaan Koperasi dan UKM belum berkualitas	Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM yang berkualitas	Bekerja sama dengan PT dan asosiasi untuk melakukan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seringnya terjadi pergantian masa jabatan pengurus dan pengawas koperasi</li> <li>▪ Adanya wirausaha baru</li> </ul>	Upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan koperasi dan UKM belum optimal
2. Kelembagaan	Belum semua koperasi dan UKM memiliki kelembagaan yang berkualitas	Koperasi dan UKM memiliki kelembagaan yang berkualitas	Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan bintek bagi koperasi dan UKM	Tuntutan permintaan pasar	Upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM belum optimal
3. Inovasi dan adopsi teknologi	Belum semua koperasi dan UKM melakukan inovasi dan adopsi teknologi	Koperasi dan UKM dapat melakukan inovasi dan adopsi teknologi	Perlu dilakukan bintek, pelatihan, dan pendampingan mengenai inovasi dan adopsi teknologi	Tuntutan permintaan pasar	Penyelenggaraan bintek dan pelatihan dalam rangka meningkatkan Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal
4. Kemitraan	Koperasi dan UMKM belum seluruhnya mengenal serta bergabung dalam	Koperasi dan UKM dapat melakukan kemitraan dengan perbankan dan	Perlunya fasilitasi kemitraan dengan perbankan dan pengusaha	Komitmen perbankan dan pengusaha	Upaya fasilitasi jaringan kemitraan koperasi dan UKM masih belum optimal

	kemitraan dan pasar	pengusaha			
5. Permodalan	Masih banyak koperasi dan UKM belum bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Koperasi dan UKM dapat dengan mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Perlu pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi agar koperasi dan UKM <i>bankable</i>	Komitmen perbankan	Pelaksanaan pelatihan pembukuan bagi koperasi dan UKM belum efektif
6. Pelayanan terhadap Pengguna PD.	Pelayanan prima masih belum optimal	SKPD dapat memerikan layanan prima dengan mengacu kepada SOP	Melakukan pelayanan optimal dengan reward and punishment	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kemampuan SDM</li><li>▪ Banyaknya agenda diluar PD</li></ul>	Pelayanan prima SKPD belum optimal

### 3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, dirumuskan visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah : **Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya Sistem e-government menuju *smart regency* pada Tahun 2021.**

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

**Sejahtera** : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

**Mandiri** : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase

peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Terintegrasikannya Sistem *e-government*: Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap, dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi disusun Misi. Adapun Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

**Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

**Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

**Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

**Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan**

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

**Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional**

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman mendukung misi yang ketiga yaitu meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan. Misi tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi. Adapun sasaran, strategi, serta arah kebijakan ditunjukkan pada Tabel 3.2. sebagai berikut:



Tabel 3.2. Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016 – 2021 terkait Koperasi dan UKM

Misi (1)	Strategi (2)	Arah Kebijakan (3)
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.	1. Pendampingan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan nilai Lakip Kabupaten A</li> <li>▪ Perwujudan opini BPK terhadap LKD WTP</li> </ul>
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan indeks kepuasan masyarakat</li> </ul>
Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	1. Mengembangkan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan keaktifan koperasi</li> </ul>
	2. Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM</li> <li>▪ Meningkatkan aksesibilitas UMKM</li> </ul>

Sesuai dengan telaah RPJMD Kabupaten Sleman, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan terkait pengembangan Koperasi dan UKM yang ditunjukkan oleh tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p><b>Misi 1</b> : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.</p> <p><b>Program :</b></p>				
1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum semua kegiatan memiliki SOP dan SP	Jika tidak dibuat SOP dan SP pelayanan kurang maksimal	Memaksimalkan pelayanan serta membuat SOP dan SP
2	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pekerjaan yang ada, dituntut dapat menyelesaikan tepat waktu	---	Komitmen untuk melaksanakan tugas tetap tinggi
3	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.	Pencatatan/ inventarisasi barang perlu dilakukan secara rutin setiap bulan	Data dari Bidang Aset BKAD belum sama dengan data pengurus barang Dinas. SIM Aset masih dalam tahap pengembangan	Data dari pengurus barang Dinas sudah lengkap.
4	Pelayanan administrasi perkantoran.	Banyaknya permintaan data dari luar yang harus dilayani	Terbatasnya personil yang melayani	Menyiapkan dan menyajikan data lebih awal
5	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Terbatasnya ruangan kerja yang memadai bagi staf	Tempat atau ruangan kerja bagi staf sangat terbatas, desak-desakan dan kurang representatif	Semangat kerja dari staf sangat tinggi dalam menyelesaikan tugas
6	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Peningkatan kapasitas SDA melalui diklat, masih sebagian besar belum dilaksanakan.	Panggilan untuk diklat belum bisa diprediksikan pelaksanaannya.	Menunggu undangan diklat. Komitmen tim menyelesaikan tugas tetap tinggi

7	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	Arsip yang ada penyimpanannya memakan banyak tempat	Terbatasnya ruangan yang ada, Dinas belum memiliki tempat/ gudang penyimpanan arsip	Pengelolaan arsip dari unit pengolah/dinas sudah dilaksanakan dengan baik,
8	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Era keterbukaan informasi menuntut pelayanan yang lebih baik dan tepat waktu	Jaringan wifi terkadang lancar, tapi terkadang juga ada trjadi gangguan	Layanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan dan tidak dipungut biaya
9	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Perlunya up dating data UMKM secara kontinyuitas agar data yang disajikan lebih akurat dan standar	Untuk mendapatkan data yang akurat sangat tergantung dari pihak ke 3 yaitu kecamatan dan desa	Komitmen tim menyelesaikan tugas tetap tinggi
10	Penegakan hukum	Memperhatikan legalitas	Terbatasnya akses dari pelaku usaha mikro dalam memperoleh perijinan	Memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha untuk dapat mengurus perjinan
11	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tidak semua desa di wilayah Sleman mendukung program ini	Terbitnya Peraturan Desa menjadi aturan main yang berbeda, sehingga biaya pengurusan sertifikasi tanah setiap desa berbeda-beda	Komitmen tim menyelesaikan tugas tetap tinggi
12	Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Renstra diperlukan masukan/ ide-ide yang visioner untuk 5 tahun ke depan	Panduan yang berubah-ubah	Komitmen tim menyelesaikan tugas tetap tinggi
<b>Misi 3</b> : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan				
<b>Program :</b>				
1	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terbatasnya akses alat dan permodalan untuk pengembangan usaha jangka panjang	Regulasi yang kurang mendukung	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi
2	Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terbatasnya akses alat dan permodalan untuk pengembangan usaha jangka panjang	Regulasi yang kurang mendukung	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi

3	Penciptaan Iklim usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Diperlukan pembinaan berupa sosialisasi, bimtek, pelatihan dan pendampingan bagi koperasi dan UKM	Kualitas kelembagaan dan kemampuan manajerial pengelola koperasi dan UKM masih terbatas	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi sekalipun diluar jam kerja
4	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Perubahan Anggaran dasar (AD) koperasi tersentral di pusat	Belum ada sstem informasi pelayanan perubahan Anggaran dasar secara <i>on line</i>	Komitmen SKPD dalam memberikan fasilitasi pelayanan perubahan AD
5	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Perlu lebih selektif dalam pemberian rekomendasi dana penguatan modal Terbatasnya akses alat pelatihan untuk pengembangan usaha UKM	Terjadinya kredit macet  Regulasi yang kurang mendukung	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi  Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi
6	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Perlunya peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM Perlunya memfasilitasi pelaku usaha dengan promosi di berbagai pameran	Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM masih terbatas Beberapa pelaku usaha belum dapat mengikuti pameran karena keterbatasan kuota	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi  Menyusun anggaran pada tahap berikutnya
7	Pengembangan industri kecil menengah	Belum semua UKM siap memenuhi standardisasi dan serifikasi produk	Masih terbatasnya UKM yang siap memenuhi stardadisasi dan sertifikasi produk	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Sleman, atas Misi dalam RPJMD Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman berkontribusi untuk mewujudkan Misi Ke-1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; dan Misi Ke-3, yaitu Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut maka disusun sasaran-sasaran yang ingin di capai.

1. Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah ;
2. Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk koperasi dan UKM sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian Kabupaten Sleman;

Sedangkan arah kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM adalah

1. Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Sleman melalui pelayanan satu pintu ;
2. Pengembangan kemitraan usaha koperasi/UKM dengan industri besar dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif;

### **3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY**

#### **3.3.1. Telahaan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia**

Telaah terhadap rencana kerja strategi Kementrian Koperasi dan UKM RI ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level kabupaten, provinsi dengan nasional. Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis

(RENSTRA) Kementerian dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun RENSTRA provinsi. Maka tujuan, sasaran strategis dan target kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM  
Tahun 2015 – 2019

**Tujuan** : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha serta pemasaran di dalam dan luar negeri
2. Peningkatan penguatan koperasi melalui jati dirinya
3. Peningkatan jangkauan, skema, dan kualitas layanan system pendukung koparasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan.
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan social serta ekonomi masyarakat
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan geberasi muda dan kelompok produktif lainnya
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian, dan perlindungan usaha
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya

Sasaran Strategis	Target Kinerja
1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional	a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil c. Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang. e. Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi.
2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM	a. Terlaksananya kajian, rintisan, replikasi, publikasi pengembangan teknologi informasi pengkajian dan partisipasi pada forum kerjasama internasional dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM b. Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, dukungan system bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM
3. Peningkatan Daya saing	a. Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, HKI dan kehalalan produk 3.085 KUMKM b. Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan <i>e commerce</i> dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM c. Diklat vocational 1500 orang d. Diklat LKM/KSP 650 orang e. Diklat perkoperasian 1800 orang f. Tempat Praktek Ketrampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit

	<p>g. Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1050 orang</p> <p>h. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang</p> <p>i. Pengembangan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit</p>
4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk UKM nasional	<p>a. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 koperasi</p> <p>b. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 koperasi</p> <p>c. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model</p> <p>d. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5230 KUMKM</p> <p>e. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM</p> <p>f. Jumlah dukungan revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit</p> <p>g. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UM</p> <p>h. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani UKM nasional</p>
5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM	<p>a. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 koperasi</p> <p>b. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS primer nasional</p> <p>c. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum koperasi</p> <p>d. Peningkatan permodalan bagi 3.395 koperasi pedesaan dan perkotaan</p> <p>e. Bantuan start up capital bagi</p>



	<p>wirausaha pemula</p> <p>f. Pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi 1.000 KUMKM</p> <p>g. Fasilitasi terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK</p> <p>h. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR</p> <p>i. Tersalurkannya pinjaman pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM</p>
6. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM	<p>a. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 rancangan peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian</p> <p>b. Sistem informasi UKM secara <i>on-line</i></p>

Dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Kabupaten Sleman, maka Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman telah menetapkan arah kebijakan untuk 5 tahun kedepan. Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi dan UKM unggulan
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan

Identifikasi permasalahan SKPD berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan di Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi dan UKM	Belum dimilikinya seluruh data potensi Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan data yang akurat</li> <li>▪ Keterbatasan <i>roadmap</i> pembanding</li> </ul>	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dengan baik	Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM masih terbatas	Koperasi dan UKM belum seluruhnya memiliki kualitas kelembagaan	Kabupaten Sleman memiliki koperasi dan UKM potensial
3	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan manajerial koperasi dan UKM belum optimal</li> <li>▪ Inovasi dan adopsi teknologi masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelola koperasi dan UKM belum seluruhnya memiliki kemampuan manajerial dan berdaya saing</li> <li>▪ Koperasi dan UKM belum seluruhnya melakukan inovasi dan adopsi teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten sleman memiliki koperasi dan UKM yang potensial di bidang manajerial</li> <li>▪ Kabupaten sleman memiliki koperasi dan UKM yang potensial di bidang inovasi dan teknologi</li> </ul>
4	Peningkatan wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan	Terbatasnya akses alat dan permodalan untuk pengembangan usaha jangka panjang	Regulasi yang kurang mendukung	Komitmen tim SKPD untuk menjadi fasilitator tetap tinggi

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Menjadi Akselator Terwujudnya Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Peningkatan Daya Saing Untuk Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat. Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : “Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY berperan sebagai pemercepat (Akselerator) di dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah, disamping sebagai perumus kebijakan di lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.”

Adapun misi yang diemban oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah Meningkatkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Penjelasan dari misi tersebut adalah “Pada saat terjadinya krisis finansial global, telah dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha kecil menengah yang didalamnya termasuk Koperasi dan UMKM mampu bertahan bahkan mampu menjadi katub pengaman perekonomian nasional. Untuk itu pengembangan Koperasi dan UMKM ini menjadi penting karena bisa menjadi stabilisator jika suatu ketika akan terjadi krisis lainnya. Disamping itu pengembangan terhadap koperasi dan UMKM menjadi penting karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia berada pada skala kecil dan menengah sehingga pemberdayaan terhadap mereka akan menjadi roda penggerak terhadap perputaran ekonomi masyarakat DIY”.

Sejalan dengan visi misi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antara Provinsi dengan daerah dalam pembagian kelompok sasaran, mana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi mana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Adapun telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY ditunjukkan oleh tabel 3.6. sebagai berikut:

Tabel 3.6. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat	Belum dimilikinya seluruh data potensi Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan data yang akurat</li> <li>▪ Keterbatasan <i>roadmap</i> pembanding</li> </ul>	Komitmen tim SKPD menyelesaikan tetap tinggi
2	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan manajerial koperasi dan UKM belum optimal</li> <li>▪ Inovasi dan adopsi teknologi masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelola koperasi dan UKM belum seluruhnya memiliki kemampuan manajerial dan berdaya saing</li> <li>▪ Koperasi dan UKM belum seluruhnya melakukan inovasi dan adopsi teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten sleman memiliki koperasi dan UKM yang potensial di bidang manajerial</li> <li>▪ Kabupaten sleman memiliki koperasi dan UKM yang potensial di bidang inovasi dan teknologi</li> </ul>

### **3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Tujuan penataan tata ruang adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional RTRW berfungsi sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten
2. Acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang, dan rencana sektoral lainnya
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota

Kebijakan dan Strategi perencanaan Tata Ruang terdiri atas:

1. Kebijakan dan strategi struktur ruang
2. Kebijakan dan strategi pola ruang, dan
3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota

Kebijakan struktur ruang Kabupaten terdiri atas:

1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan Kabupaten Sleman yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten Sleman.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan akan mencegah terjadinya dampak lingkungan yang sistemik, dimana pembangunan tidak bisa diteruskan dan sumber daya alam rusak tanpa kemungkinan pemulihan kembali. Dengan kata lain pembangunan harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia baik pada masa kini maupun pada masa depan dimana kebutuhan dasar generasi mendatang pun tidak diabaikan.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Hal yang paling krusial dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rekomendasi mitigasi terhadap program-program yang dilaksanakan dalam RPJMD agar memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan.

Tahapan telaahan berupa menganalisis dampak positif dan negative indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang termuat dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan. Adapun telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY ditunjukkan oleh tabel 3.7. sebagai berikut:

Tabel 3.7. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaah RTRW dan KLHS

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
(3)	(4)	(5)
Lokasi Koperasi dan UKM yang tidak sesuai dengan RTRW dan Lingkungan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan dana Koperasi dan UKM dalam memiiah lokasi usaha/ memproses perijinan usaha</li> <li>▪ Sinergitas antar pelaku usaha koperasi dan UKM belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya proses perijinan dan legalitas usaha</li> <li>▪ Adanya program kemitraan</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal, selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis yang merupakan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Berikut disampaikan isu-isu strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*)
3. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
4. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas
5. Akses modal bagi koperasi masih terbatas
6. Rendahnya daya saing koperasi dalam penguasaan teknologi
7. Rendahnya produktifitas UKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi
8. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya, terutama dalam memperoleh akses pinjaman/ pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.
9. Iklim dunia usaha kurang kondusif, misalnya dalam hal prosedur perijinan maupun transaksi perijinan
10. Rendahnya daya saing UKM dalam hal keterbatasan inovasi, kecepatan teknologi dengan produk permintaan pasar, kepemilikan sertifikat standardisasi, dan jaminan mutu produk UKM.
11. Jaringan kemitraan UKM dan pengembangan pasar masih terbatas
12. Akses modal bagi UKM masih terbatas.